

# PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN INTEGRITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pesi Suryani

*Universitas Terbuka Bengkulu*

---

## Abstract

This study aims to examine the influence of public participation, accountability, transparency and integrity to the regional financial performance of Central Bengkulu District. Populations in this study are all financial managers that exist in the organization of regional government of Central Bengkulu District, where there are 38 organizations of regional devices. While the sample in this study is based on purposive judgement sampling method, where researchers have determined some previous criteria.

The result of this research showed that public participation, accountability and integrity have a positive effect on the regional financial performance of Central Bengkulu District. While transparency hasn't effect on the regional financial performance of Central Bengkulu District.

That findings imply that the district government of Central Bengkulu should be maintained and improved the level of public participation, accountability, transparency and integrity of local financial management in order to improve its financial performance.

Keywords: regional financial performance, public participation, accountability, transparency and integrity

---

## 1. Pendahuluan

Open government merupakan tuntutan zaman karena berkembangnya pengetahuan, teknologi dan pengaruh globalisasi. Setiap individu dalam masyarakat menuntut keterbukaan dari pemerintah yang mengelolah dana publik, bagaimana dana tersebut dikelola dan kemana saja dana tersebut dipergunakan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan open government sebagai “transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan.” (OECD, 2016).

Sebagai stakeholder dari sistem pemerintahan, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang andal tentang dana publik dan ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat ataupun ide-ide mereka dalam menjalankan pemerintahan baik secara langsung ataupun melalui wakil mereka di badan legislatif. Jika keuangan daerah tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan peluang terjadinya penyimpangan seperti korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, dan akan menyengsarakan masyarakat di daerah tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk melihat baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat melalui opini yang

dikeluarkan oleh BPK RI. Berikut ini adalah opini yang diterima Kabupaten Bengkulu Tengah selama 6 tahun terakhir.

Table 1. Opini Audit 2011-2016

Tahun	Opini
2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan status TGR (Tuntutan Ganti Rugi) terhadap beberapa OPD. Sedangkan selama 5 tahun sebelumnya Kabupaten Bengkulu Tengah selalu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). TGR yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ini dikarenakan ada beberapa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Status TGR pada beberapa OPD ini menunjukkan bahwa kurang baiknya kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, apakah yang melatarbelakangi terjadinya penurunan opini tersebut dan apakah penurunan opini tersebut menunjukkan buruknya kinerja keuangan suatu daerah.

Kinerja keuangan suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan saja tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-keuangan, pada penelitian ini faktor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan daerah, yaitu partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu serta mendapatkan bukti empiris mengenai partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, dan integritas pada OPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Partisipasi publik berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan (Pusat Bahasa, 2001: 831). Dalam teori Stakeholder, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, kebijakan yang diambil pemerintah juga akan mempengaruhi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam sistem pemerintahan.

Sesuai dengan penelitian Permana (2015), partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Putra (2014) juga menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal/otoritas yang lebih tinggi (Turner dan Hulme, 1997). Dalam teori stakeholder, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan tuntutan para stakeholder baik di pusat maupun di daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pemerintah harus memberikan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut penelitian Permana (2015), akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Saputra (2014), juga menunjukkan hal yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Baik atau buruknya kinerja keuangan daerah dipengaruhi juga oleh tingkat akuntabilitas OPD yang bersangkutan.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh perwakilan rakyat dan masyarakat secara umum. Dalam teori stakeholder, masyarakat berhak untuk menuntut keterbukaan pemerintah yang mengelola dana publik, bagaimana dana tersebut dikelola dan kemana saja dana tersebut diperuntukkan. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2017), menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, dimana anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh seluruh pegawai dari suatu kegiatan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelola anggaran. Penelitian yang dilakukan Saputra (2014), juga menunjukkan hal yang sama bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Integritas para aparatur pengelola keuangan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan institusi. Dengan memiliki integritas yang tinggi, maka para aparatur pengelola keuangan daerah akan menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan daerah yang mereka kelola.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusnaena dan Syahril (2013), menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Erina (2012), juga menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Aceh.

Adanya kasus tersebut dan melihat pentingnya partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam mempengaruhi baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi, dan Integritas terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi dan integritas terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, dan integritas agar bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah, serta dapat berguna sebagai referensi yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan kajian yang lebih mendalam bagi para peneliti lainnya khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang akan melakukan penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik..

## **2. Tinjauan Pustaka**

### *2.1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)*

Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Dalam Bussiness Dictionary, pemangku kepentingan didefinisikan sebagai kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan, dan kebijakan (Mianti, 2014)

### *2.2. Kinerja Keuangan Daerah*

Menurut Bastian (2006: 273) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Prinsip Open

Government menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada empat prinsip open government menurut OECD, yaitu:

Menurut Cornwall dan Gaventa dalam (Permana, 2015), partisipasi publik dapat diartikan sebagai proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan diantara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lainnya.

Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal/otoritas yang lebih tinggi (Turner dan Hulme, 1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan” (Djalil, 2014: 388).

Integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama

### *2.3. Partisipasi Publik dan Kinerja Keuangan Daerah*

Dalam teori Stakeholder, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, kebijakan yang diambil pemerintah juga akan mempengaruhi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, maka dituntutlah para pihak yang terkait (stakeholders) untuk berpartisipasi dalam memajukan dan mensejahterakan daerahnya, dengan ikut andil dalam perencanaan dan penetapan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah serta sama-sama aktif dalam mengawasi jalannya kinerja kebijakan tersebut demi terlaksananya prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang andal tentang dana publik dan ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat ataupun ide-ide mereka dalam menjalankan pemerintahan baik secara langsung ataupun melalui wakil mereka di badan legislatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2015), menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan. Semakin tinggi partisipasi publik dalam perencanaan maupun pengawasan setiap kegiatan ataupun program pemerintah, maka kinerja keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Achmadi (2002), bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Selain itu partisipasi publik ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasai bagian dari pembangunan. Hal ini akan berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan. Penelitian yang dilakukan Putra (2014) juga menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik. Hal ini berarti bahwa semakin besar partisipasi publik maka semakin tinggi tingkat kinerja organisasi layanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Partisipasi Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

#### 2.4. Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Daerah

Dalam teori stakeholder, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan tuntutan para stakeholder baik di pusat maupun di daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pemerintah harus memberikan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk pengelolaan keuangan secara akuntabel. Akuntabilitas juga akan berdampak pada kinerja keuangan, semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah, maka mengindikasikan kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2015), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, semakin tinggi akuntabilitas maka kinerja keuangan suatu daerah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan tercapai. Penelitian yang dilakukan Saputra (2014), juga menunjukkan hal yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Akuntabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja keuangan daerah yang baik pula. Jika semua anggaran atau dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan atau program dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran hal itu menunjukkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah telah tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

#### 2.5. Transparansi dan Kinerja Keuangan Daerah

Dalam teori stakeholder, masyarakat berhak untuk menuntut keterbukaan pemerintah yang mengelola dana publik, bagaimana dana tersebut dikelola dan kemana saja dana tersebut diperuntukkan. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemerintah sebagai agent yang disertai amanat untuk mengelola keuangan daerah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang dikelolanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka pemerintah dituntut mampu menyediakan wadah bagi masyarakat untuk dapat memantau kinerja pemerintah dan mempermudah akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2017), menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, dimana anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh seluruh pegawai dari suatu kegiatan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelola anggaran. Penelitian yang dilakukan Saputra (2014), juga menunjukkan hal yang sama bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dengan semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah daerah, maka akan menunjukkan semakin baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Sama halnya dengan kinerja keuangan daerah, semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin baik kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

## 2.6. Integritas dan Kinerja Keuangan Daerah

Dalam teori Stakeholder, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, kebijakan yang diambil pemerintah juga akan mempengaruhi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam sistem pemerintahan. Pemerintah sebagai agent yang diserahi amanat untuk mengelola keuangan daerah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang dikelolanya. Integritas para aparatur pengelola keuangan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan institusi. Dengan memiliki integritas yang tinggi, maka para aparatur pengelola keuangan daerah akan menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan daerah yang mereka kelola.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusnaena dan Syahril (2013), menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Semakin tinggi integritas seorang karyawan, maka akan semakin baik pula kinerjanya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Erina (2012), juga menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Aceh. Semakin tinggi integritas seorang auditor maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik dan kinerja mereka pun akan menjadi baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Integritas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.1.1. Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Kinerja keuangan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah output yang dicapai dari setiap kegiatan atau program yang telah atau akan dilaksanakan oleh setiap OPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam upaya menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator input, process, output, outcome, dan benefit. Variabel ini menggunakan 8 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (Tidak Pernah) menunjukkan kinerja keuangan daerah sangat buruk sedangkan nilai 5 (Sering Sekali) menunjukkan kinerja keuangan daerah sangat baik.

#### 3.1.2. Partisipasi Publik (X1)

Partisipasi publik merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Variabel ini menggunakan 10 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (Tidak Pernah) menunjukkan tingkat partisipasi publik masih sangat rendah sedangkan nilai 5 (Sering Sekali) menunjukkan tingkat partisipasi publik sangat tinggi.

#### 3.1.3. Akuntabilitas (X2)

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap pertanggungjawaban tersebut.

Variabel ini menggunakan 10 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (Tidak Pernah) menunjukkan sangat rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Sedangkan nilai 5 (Sering Sekali) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat tinggi.

#### 3.1.4. *Transparansi (X3)*

Transparansi merupakan keterbukaan dalam hal pemberian informasi oleh penyelenggara pemerintahan atas kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (Tidak Pernah) menunjukkan bahwa sangat rendahnya tingkat transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan nilai 5 (Sering Sekali) menunjukkan bahwa sangat tingginya tingkat transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### 3.1.5. *Integritas (X4)*

Integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari serta bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik organisasi.

Variabel ini menggunakan 6 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (Tidak Pernah) menunjukkan bahwa sangat rendahnya tingkat integritas. Sedangkan nilai 5 (Sering Sekali) menunjukkan bahwa sangat tingginya tingkat integritas pegawai pengelola keuangan daerah

### 3.2. *Metode Pengambilan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan yang ada di OPD Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana terdapat 38 OPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive judgement sampling. Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan instrument kuesioner dan in-depth interview (wawancara mendalam) pada pihak-pihak tertentu

### 3.3. *Metode Analisis*

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (Multiple Linier Regresion) yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan persamaan

$$KKD = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 AK + \beta_3 TR + \beta_4 I + e$$

Keterangan:

KKD = Kinerja Keuangan Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

PP = Partisipasi Publik

AK = Akuntabilitas

TR = Transparansi

I = Integritas

e = Standar Error

Untuk dapat melihat layak tidaknya regresi maka lihat nilai F. Untuk melihat pengaruh variabel partisipasi publik (X1), akuntabilitas (X2), transparansi (X3), dan integritas (X4) terhadap kinerja keuangan daerah (Y), yaitu dengan melihat nilai sig. Apabila nilai sig dibawah 0,05 maka dapat dikatakan partisipasi publik (X1), akuntabilitas (X2), transparansi (X3), dan integritas (X4)

berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y), tetapi apabila diatas 0,05 dapat dikatakan variabel tersebut tidak berpengaruh. Selanjutnya, untuk melihat arah pengaruh maka dilihat koefisien regresi. Apabila koefisien regresi positif berarti pengaruh positif dan apabila koefisien regresi negatif berarti pengaruh negatif. Untuk melihat berapa persentase besarnya pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari adjusted R square.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1. Deskriptif Statistik

Berdasarkan Tabel 2 variabel kinerja keuangan daerah menunjukkan nilai rata-rata aktual 3,84 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan prosedur administrasi yang ada.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap keempat informan yakni, EH, SJ, MG dan RS. Menurut keempat informan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan prosedur administrasi yang ada. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mencapai output dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap output dari program atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah juga meningkat.

Variabel partisipasi publik menunjukkan nilai rata-rata aktual 3,98 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa partisipasi publik di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tinggi. Artinya, pemerintah daerah telah melibatkan masyarakat dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan, mulai dari perencanaan pembangunan seperti melaksanakan MUSRENBANG ataupun melalui e-planning untuk menampung aspirasi masyarakat.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap keempat informan yakni, EH, SJ, MG dan RS. Menurut keempat informan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan wadah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti adanya sistem e-planning dan MUSRENBANG untuk menampung aspirasi masyarakat.

Variabel akuntabilitas menunjukkan nilai rata-rata aktual 4,02 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat akuntabilitas pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tinggi. Artinya, pemerintah daerah telah melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan SOP yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap keempat informan yakni, EH, SJ, MG dan RS. Menurut keempat informan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, sesuai dengan SOP instansi, berdasarkan DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) yang telah disetujui sebelumnya dan terbebas dari conflict interest.

Variabel transparansi menunjukkan nilai rata-rata aktual 4,22 berada pada range nilai 4,21-5,00 dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat transparansi pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sangat tinggi. Artinya, pemerintah daerah telah mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik, baik melalui homepage, media massa ataupun melalui badan atau instansi yang terkait.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap keempat informan yakni, EH, SJ, MG dan RS. Menurut keempat informan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mempublikasikan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada masyarakat, baik melalui media massa, homepage dan atau instansi yang terkait, seperti PPID dan arsip



daerah. Selain itu pemerintah daerah juga selalu mempublikasikan rencana pembeliannya secara elektronik melalui situs sirup.lkpp.go.id setiap awal tahun.

Selanjutnya, variabel integritas menunjukkan nilai rata-rata aktual 3,98 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat integritas aparatur pengelola keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tinggi. Artinya, aparatur pengelola keuangan daerah telah memiliki integritas yang tinggi, dimana mereka telah mengikuti kode etik yang ada dalam menyelesaikan tugas, dapat meminimalisir melakukan kecurangan, menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dan selalu mengikuti kebijakan dan nilai-nilai yang ada di instansi.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap keempat informan yakni, EH, SJ, MG dan RS. Menurut keempat informan tersebut aparatur pengelola keuangan daerah telah mengikuti kode etik yang ada dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari melakukan tindak KKN.

Table 2. Deskriptif Statistik

Variabel	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Daerah	3,84	3,783
Partisipasi Publik	3,98	2,047
Akuntabilitas	4,02	2,908
Transparansi	4,22	2,302
Integritas	3,98	2,575

#### 4.2. Hasil Analisis Berganda

Tabel 3 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 46,442 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis dapat dianalisis lebih lanjut, atau model persamaan regresi yang digunakan adalah fit (layak). Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan keempat variabel mampu menjelaskan fenomena bagaimana kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 3 juga memperlihatkan nilai koefisien determinasi berganda disesuaikan (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,764. Angka tersebut memberikan arti bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi dan integritas sebesar 76,4%. Baik atau buruknya kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut. Sedangkan sisanya 23,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa partisipasi publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 kurang dari tingkat signifikansi ( $\alpha < 0,05$ ) dengan arah nilai koefisien positif ( $\beta_1 = 0,710$ ), yang artinya bahwa partisipasi publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana terdapat pengaruh positif partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 kurang dari tingkat signifikansi ( $\alpha < 0,05$ ) dengan arah nilai koefisien positif ( $\beta_2 = 0,206$ ), yang artinya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,809 lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha < 0,05$ ), walaupun demikian arah nilai koefisiennya positif ( $\beta_3 = 0,034$ ),

yang artinya bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian, hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 kurang dari tingkat signifikansi ( $\alpha < 0,05$ ) dengan arah nilai koefisien positif ( $\beta_4 = 0,631$ ), yang artinya bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana terdapat pengaruh positif integritas terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis keempat diterima.

Table 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig
Partisipasi Publik	0,710	2,752	0,008
Akuntabilitas	0,206	2,036	0,047
Transparansi	0,034	0,243	0,809
Integritas	0,631	3,099	0,003
Adjusted R <sup>2</sup>		0,764	
F-hitung		46,442	
Sig		0,000	

#### 4.3. Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kinerja Keuangan Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel partisipasi publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan wadah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti adanya sistem e-planning dan MUSRENBANG untuk menampung aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permana (2015), menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Putra (2014) juga menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik.

#### 4.4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini bermakna semakin tinggi tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap setiap kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik. Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan aturan hukum atau regulasi yang ada. Semua program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan berdasarkan DPA yang telah disetujui sebelumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permana (2015), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Saputra (2014), juga menunjukkan hal yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

#### *4.5. Pengaruh Integritas terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah*

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel integritas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini bermakna semakin tinggi tingkat integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan yang menunjukkan bahwa para pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki integritas cukup tinggi. Dimana para pengelola keuangan daerah telah mengikuti nilai-nilai yang ada di instansi, melaksanakan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, dan menyelesaikan setiap tugas mengikuti kode etik dan peraturan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yusnaena dan Syahril (2013), menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Erina (2012), juga menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Aceh.

### **5. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi publik terhadap setiap kegiatan ataupun program pemerintah daerah maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik atau target kinerja keuangan akan tercapai. Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah daerah maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik atau dengan kata lain kinerja keuangan suatu daerah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan tercapai. Integritas terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas pengelola keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah akan semakin baik pula atau dengan kata lain kinerja keuangan akan tercapai.

Sedangkan, transparansi tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah ada, namun hasilnya menunjukkan bahwa tingkat transparansi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah, tinggi atau rendahnya transparansi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain, tidak dilibatkannya pihak eksternal (masyarakat) sebagai responden dalam menjawab pertanyaan variabel transparansi. Serta tidak dilibatkannya beberapa OPD di tingkat Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan keterbatasan waktu dan akses yang tidak memungkinkan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan pihak eksternal (masyarakat) sebagai responden dalam menjawab pertanyaan variabel transparansi, serta bisa melibatkan seluruh OPD yang ada agar hasil penelitian lebih valid :

### **Daftar Pustaka**

- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Erina, Cut dan Darwanis. 2012. Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (studi pada Inspektorat Aceh). ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 Nomor 1. Hal 15-27.

- 
- Hajar, Nuzul Ibnu. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Skripsi: Halu Oleo.
- OECD. 2016. OECD Kajian Open Government Indonesia hal-hal Pokok 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Permana, Imam Arif. 2015. Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Pusat Bahasa. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Hendra G. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Saputra, Devi Satria dan Darwanis. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3 Nomor 2. Hal 76-84.
- Situs resmi BPK. <http://www.bengkulu.bpk.go.id>. Diakses pada 3 November 2017.
- Turner, M., dan David Hulme. 1997. *Governance, Administration, and Development*. London: MacMillan Press.
- Yusnaena dan Syahril. 2013. Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. ISSN 1693-2617 Jurnal Menara Ilmu Volume 9 Nomor 42. Hal 186-191.